

DAFAR PUSTAKA

- Haryono, Cosmas Gatot. 2020. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: CV Jejak.
- Hsb, Fitriyah Nur. 2020. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Manajemen dan Keterampilan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kominfo di Labuhan Batu Utara. *Tesis*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ramandey, Lazarus. 2020. *Perpajakan, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sukmawati, Anisya dan Aan Bukhori. 2021. *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Banding Pajak Pertambahan Nilai di Pengadilan Pajak (Studi Kasus pada PT. MPFI)*. Jurnal Ilmu-Ilmu Terapan dan Hasil Karya Nyata, 8(1), hal.17-25.
- Tobing, Sabar L, dkk. 2022. *Pemeriksaan Pajak*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Zuraida, Ida. 2021. *Sengketa Pajak dan Upaya Penyelesaiannya*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang *Pengadilan Pajak*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2010 tentang *Penetapan Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang*

Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang *Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 tentang *Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.*

